



PEMERINTAH  
KABUPATEN PASURUAN

# RENJA 2024



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN



Jl. Hayam Wuruk No.14 Pasuruan

[bkd.pasuruankab102@gmail.com](mailto:bkd.pasuruankab102@gmail.com)

[www.bkd.pasuruankab.go.id](http://www.bkd.pasuruankab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT. Karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Rencana kerja merupakan wujud dari implementasi program yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis 2024-2026, oleh sebab itu Rencana Kerja memuat seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya telah disesuaikan dan diarahkan pada pencapaian tujuan serta sasaran yang hendak dicapai.

Sebagai OPD yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diharapkan akan memberikan dampak terhadap akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang pada gilirannya nanti akan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan layanan publik.

Harapan kami bahwa dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana kerja tahun 2024, seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya saran dan kritik akan selalu menjadi perhatian kami demi kesempurnaan program kegiatan kedepan, kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat kekurangan di dalam penyajiannya. Kepada pihak

yang terlibat dalam penyusunan Renja ini kami ucapkan terimakasih

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) kami untuk tahun 2024 mudah – mudahan berguna dan bermanfaat serta dalam penyusunan Renja ini mendapatkan Ridho dari Alloh SWT. Amin.

Pasuruan, 2023

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 .....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2023 serta Capaian Renstra .....	11
2.2. Analis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah .....	36
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah .....	40
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	41
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	53
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	54
3.1. Telaah terhadap kebijakan dan Prioritas Nasional ....	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	57
3.3. Rumusan Rencana Program & Kegiatan Tahun 2022..	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	78
BAB V PENUTUP .....	80

5.1. Cacatan Penting yang mendapat perhatian .....	80
5.2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan .....	80
5.3. Rencana Tindak Lanjut .....	81

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN**  
**NOMOR : TAHUN 2023**  
**TANGGAL : TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

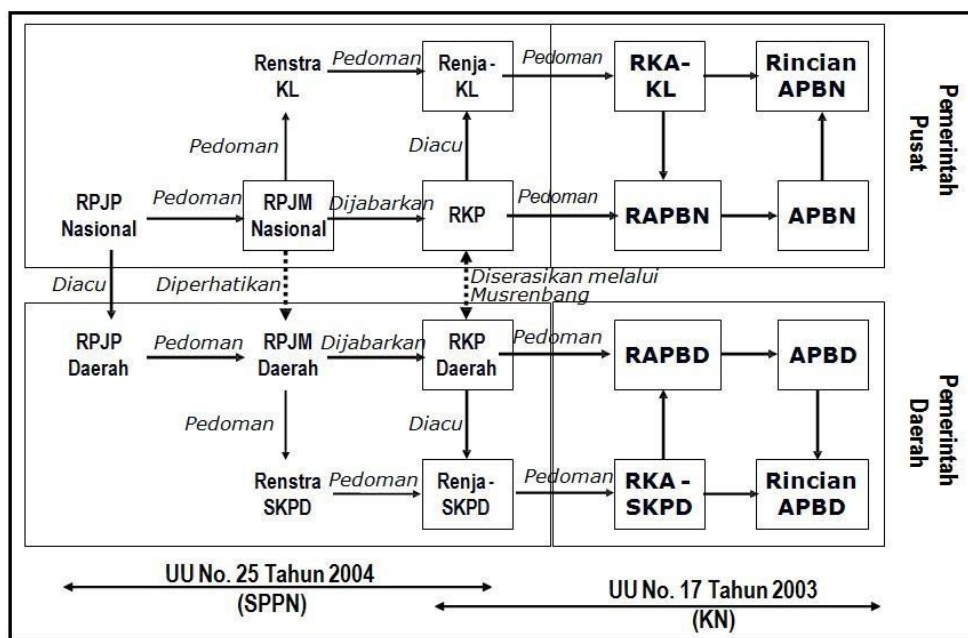
**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

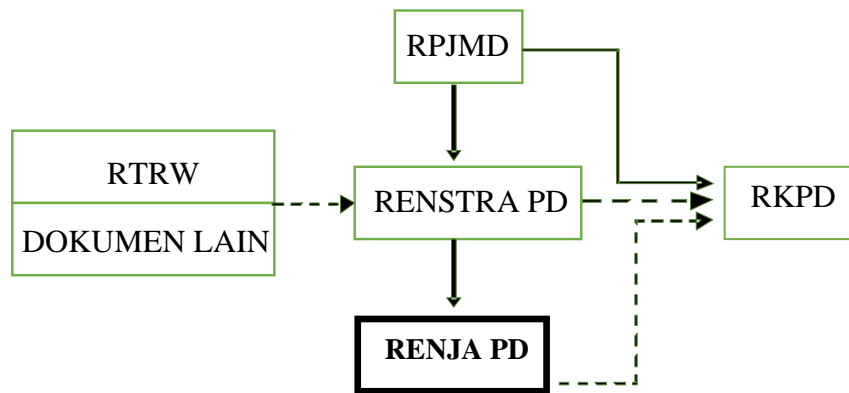
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, dan lokasi kegiatan kelompok sasaran serta prakiraan maju. Rencana kerja perangkat daerah disusun berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dan sub kegiatan.

Penyusunan Rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu

terhadap kondisi terkini, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD, RPD atau RPJMD serta Renstra. Sejalan dengan hal tersebut pembuatan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2024 mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025, RPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 2024–2026 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2024-2026.



### Tahapan Penyusunan Renja



### Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

#### 1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1. Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

#### 1.3.2. Tujuan

1. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2024;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Sistematika penulisan Renja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan dokumen RKPD dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Pasuruan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Pasuruan, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah di Tahun 2023**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (bagi perangkat daerah yang melaksanakan SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Utama. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

# **BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

## **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional;**

## **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berisikan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai tahun berkenaan. Tujuan dan Sasaran

dilengkapi dengan indikator tujuan dan indicator sasaran beserta target tahun 2024.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berisikan tabel rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II****HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renstra Tahun 2023**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2022 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2023. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2022 secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Tujuan pembangunan Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi Bupati. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Selaku Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan kinerja keuangan tahun 2022, realisasi anggarannya mencapai Delapan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh (89,97%). Berdasar hal tersebut, dapat disimpulkan realisasi anggaran untuk tahun 2022 sudah cukup tinggi, namun masih ada beberapa realisasi anggaran yang masih rendah. Realisasi anggaran yang masih rendah terdapat pada sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Hal ini dikarenakan penerimaan P3K yang belum maksimal di tahun 2022.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Hal ini dikarenakan penyedia Pendidikan dan Pelatihan dilakukan oleh pihak diluar BPKPD.
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022, proses surat menyurat pada BPKPD sudah menggunakan teknologi.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan, /pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga. Pada subkegiatan ini realisasi anggaran kecil dikarenakan adanya honor narasumber serta perjalanan dinas yang tidak terserap.
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait. Pada subkegiatan ini realisasi anggaran kecil dikarenakan rekonsiliasi evaluasi kas bendahara pengeluaran SKPD trib I dan II dilaksanakan secara bersamaan sehingga penyerapan belanja menjadi tidak terserap secara maksimal.
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan. Hal ini dikarenakan hanya terlaksana 1 perbub yaitu terkait BBT yang terealisasi.

Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tentunya menjadi langkah awal untuk capaian anggaran dan kinerja dengan mengevaluasi anggaran dan kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2023. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tentunya akan mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.1**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
tahun 2019-2020										
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase pemenuhan pelayanan kantor		100%						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir		1280						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran listrik / air / telepon		540						
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		40						



**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan		590						
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK		55						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan		40						
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu		1005						
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah		216						
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor tenaga kontrak/THL		40 orang/kali						
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Tenaga kontrak/THL yang menerima Pembayaran Honor		8 laporan						
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase sarana prasarana dengan kondisi baik		100%						
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		53 unit						
	Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		4 kali						
	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		88						
	Pemeliharaan Rutin /berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang dipelihara		20 unit/kali						
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantorcdipelihara		60 unit/kali						

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Ketetapan Waktu Penyusunan Raperda APBD/P.APBD		<b>Tepat waktu</b>						
	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Tentang APBD dan P-APBD	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD,P-APBD dan Rperkada		4 peraturan						
	Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNS dan Non PNS	Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani		24174						
	Optimalisasi Fungsi BUD	Jumlah SP2D yang terbit		27.000						
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah		2 dokumen						
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD:		2 dokumen						
	Penyusunan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan SIPKD terhadap SKPD		54						
	one stop servis Pelayanan Pencairan Anggaran	Jumlah Penerbitan SP2D		13.000/Le mbar						
	Fasilitasi Optimalisasi Fungsi BUD	Jumlah Fasilitasi BUD		32000						
	fasilitasi Peningkatan tehnik & Admnistrasi Pegawai	Jumlah Pembayaran Tenaga Honorer (SK Bupati)		228 orang						
	fasilitasi Sekretariat Tim Angran Pemerintah Daerah (TAPD)	Jumlah fasilitasi sekretariat TAPD		12 kali/bulan						

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan	Jumlah Koordinasi dan sosialisasi		4 kali						
	Fasilitas pengerjaan SPD	Jumlah SPD berdasarkan anggaran kas SKPD		12000 lembar						
	Fasilitasi Optimalisasi Fungsi PPKD	Jumlah Proposal dana Bantuan		12500 Dokumen Proposal						
	Sinkronisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pusat dan Propinsi	Jumlah koordinasi dan konsultasi penerimaan bagi hasil pajak pusat		30 Laporan						
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		2						
	Peningkatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi		3						
	Pengendalian Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan daerah	Jumlah Rekonsiliasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Daerah		4						
	Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Perda tentang P-APBD dan R-Perkada		2 Buku						
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah penyusunan LKPD		22 laporan						

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		54 OPD						
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persnetase Ketepatan Laporan keuangan daerah</b>		100%						
	Peningkatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, monitoring dan analisis akuntansi		56 OPD						
	Pengendalian Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Pelaksanaan APBD		56 OPD						
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah terbitnya LKPD dan Raperda, Perda, Raperbub & Perbub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		11 dokumen						
	Sosialisasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah sosialisasi tentang TP dan TGR		3 kali						
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase laporan BMD sesuai standar</b>		100%						
	Pengamanan dan Penghapusan Aset Daerah	1. Jumlah pengajuan permohonan pensertifikatan tanah 2. Jumlah Penghapusan aset usulan skpd		9 sk						

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah		65 opd						
	Perencanaan dan Penyusunan RKBMD	Jumlah tersusunnya lap.RKBMD pengadaan & RKBMD pemeliharaan APBD/P.APBD		214						
	Pembinaan Pengelolaan Asset Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah		4 kali						
	Pemantapan Penerapan Sistem Tata kelola Barang Daerah	Peningkatan SDM pengurus barang		2 Aplikasi						
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi data BMD		4 Laporan						
	Asuransi Gedung dan Kendaraan	Jumlah Aset yang diasuransikan		4 aset						
	Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan yang dihasilkan		56 OPD						
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH</b>	<b>SKM Layanan Pajak Daerah</b>		100%						
	Penatausahaan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah penetapan dan nota perhitungan		89						
	Penyampaian SPOPD	umlah penyampaian hasil penetapan pajak Bumi dan Bangunan		752.504						
	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Jumlah pendataan dan Pendaftaran obyek pajak		1.503.864						

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Penetapan dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah penetapan SKP dan Nota perhitung		813.509						
	Jumlah laporan Hasil Kegiatan	Jumlah laporan Hasil Kegiatan		8 laporan						
	Peningkatan dan pengembangan SDM tentang Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM tentang PAD		1 Kali						
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH</b>	Persentase Peningkatan Pajak Daerah		8%						
	Intensifikasi Pendapatan Asli daerah	Jumlah Intensifikasi Penerimaan PAD Desa		382						
	Sosialisasi dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah sosialisasi tentang PAD		60 WP						
	Penagihan dan Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah penagihan pajak daerah		1.351						
	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT pelayanan pajak daerah wilayah I	Jumlah Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I		100%						
	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT pelayanan pajak daerah wilayah II	Jumlah Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I		100%						
	Monitoring dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Wilayah yang dimonitoring		16 Wilayah						
	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	Jumlah ttg informasi tentang pajak daerah		2 Kali						

RENCANA KERJA TAHUN 2024

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra a PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegia tan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Progra m, Kegiata n dan Sub Kegiata n (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisa si Perang kat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingk at Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Tahun 2021-2023									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan BKD yang selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				6	5					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>21 Dokumen</b>	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	21 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Laporan	15 Dokumen	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji	Jumlah bulan gaji	14 bln	14 bln						

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	dan Tunjangan ASN	dan tunjangan ASN yang tersedia								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246 orng/bln	0	96 orng/bln	96 orng/bln	100%	150 orang/bln	246 orang/bulan	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	24 laporan				24 Dokumen	48 dokumen	66,60%
		Jumlah dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			61 orng/bln	61 orng/bln	100%	0	0	0
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian BKD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	30 Orang	10 orang	10 orang	5 orang	50%	10 orang	25 orang	83,30%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana umum	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 paket	20 paket	20 paket	20 paket	100%	20 paket	60 paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54 paket	18 paket	18 paket	18 paket	100%	18 paket	54 paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	450 paket	150 paket	150 paket	150 paket	100%	150 paket	450 paket	100%



**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	900 Paket	0	300 paket	300 paket	100%	300 Paket	600 paket	66,60%
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan peggandaan	100%	100%						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	20 Paket	0	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	20 paket	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	0	25 laporan	25 laporan	100%	25 laporan	50 laporan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 laporan	0	80 laporan	80 laporan	100%	80 laporan	160 laporan	100%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan	4 Unit	0	2 unit	2 unit	100%	2 unit	4 unit	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan yang di sediakan	3 Unit	0	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	66,60%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang di sediakan	30 Unit	10 unit	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	30 paket	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	90 Unit	30	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	90 Unit	100%

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 pucuk	100 pucuk	100 pucuk	100 pucuk	100%	100 pucuk	300 pucuk	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 rek/bln	20 rekening	20 rek/bln	20 rek/bln	100%	20 rek/bln	60 rek/bln	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Perlengkapan Kantor	54 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan	54 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Prosentase Pelayanan umum yang terbayarkan	100%	100%						
		Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang di sediakan	20 laporan	0	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan	20 laporan	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	60 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	60 unit	100%

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kali pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		0	2 kali	2 kali				
		Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit				100%	2 unit	2 unit	50%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 unit	30 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	30 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab		10 unit						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	6 Kali		2 kali	2 kali	100%	2 Kali	4 kali	66,60%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah prosentase Dokumen RKA OPD yang di setuju oleh TAPD	100%	100%						
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	4 Dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	4 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah prosentase Dokumen Perubahan RKA OPD yang di setuju oleh TAPD	100%	100%						
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang di susun	4 Dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	4 dokumen	100%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Prosentase jumlah dokumen RKA-OPD	100%	100%						
		Jumlah RKA-SKPD yang di Verifikasi	116 RKA SKPD	0	58 RKA SKPD	58 RKA SKPD	100%	58 RKA SKPD	116 SKPD	100%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Prosentase jumlah dokumen Perubahan RKA-OPD	100%	100%						
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	116 Dokumen	0	58 RKA SKPD	58 RKA SKPD	100%	58 RKA SKPD	116 RKA SKPD	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tersusun tepat waktu	6 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	6 dokumen	100%

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tersusun tepat waktu	6 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	6 dokumen	100%
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	0	100 orang	100 orang	100%	100 Orang	200 orang	100%
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah</b>	81%	85%	80%	80%	100%	81%	81%	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rasio likuiditas Kas Daerah	100%	100%						
		jumlah laporan Penerimaan kas Daerah	8000 laporan	8000 laporan						
		jumlah lembar SP2D yang terbit	17.000 lembar	17.000 lembar						
		jumlah lembar SP2B yang terbit	500 lembar	500 lembar						
		Rasio likuiditas Kas Daerah	100%	100%						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pnnelolaan Kas Daerah	48.400 Dokumen		24.200 Dokumen	24.200 Dokumen	100%	24.200 Dokumen	48.400 dokumen	100%
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tingkat defisit	<3%	<3%						

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 laporan	7 laporan					
		jumlah dokumen sebagai bahan persyaratan penyaluran dan Pelaporan Laporan Dana Alokasi Khusus Fisik melalui aplikasi On Line Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)	27 Laporan	27 Laporan					
		jumlah dokumen sebagai bahan persyaratan penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik melalui aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik (ALADIN)	45 Laporan	45 Laporan					
		Jumlah bahan penyusunan Laporan Dana perimbangan dan Dana transfer lainnya	9 jenis laporan	9 jenis laporan					
		Jumlah Laporan Dana Transfer dan Perimbangan yang disusun tepat waktu	9 jenis laporan	9 jenis laporan					

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Jumlah laporan data keuangan/dana perimbangan dana JKN dan dana Bos yang dikumpulkan dan diterima	48 Laporan	48 Laporan						
		Jumlah laporan bahan dan data keuangan/dana - dana transfer, dana JKN dan Bos yang diperiksa dan diklarifikasi	48 Laporan	48 Laporan						
		Jumlah laporan bahan dan data keuangan/dan - dana transfer, dana JKN dan BOS yang dikaji dan ditelaah	48 Laporan	48 Laporan						
		Jumlah laporan bahan laporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	48 Laporan	48 Laporan						
		Rekonsiliasi terkait dana perimbangan dana transfer lainnya	6 Laporan	6 Laporan						
		Jumlah Laporan SKPD Pengelolaan Belanja Pegawai	56 SKPD	56 SKPD						

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Jumlah skpd yang mengajukan SPP dan SPM Gaji PNS, PTT dan TPP yang diperiksa kelengkapannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai syarat kelengkapan pengajuan penerbitan SP2D	56 SKPD	56 SKPD						
		Jumlah skpd yang Menerima, memeriksa, menelaah, mengklasifikasikan data informasi/dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan penyusunan perencanaan penggajian pegawai untuk proses lebih lanjut.	56 SKPD	56 SKPD						
		jumlah Dokumen Mengolah bahan pelaksanaan penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji pegawai	600 Dokumen	600 Dokumen						
		Jumlah skpd yang Pelaksanaan proses integrasi perubahan data base gaji di kabupaten pasuruan	56 SKPD	56 SKPD						



**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Jumlah skpd yang Mengolah bahan pelaksanaan penghitungan kebutuhan anggaran gaji pegawai dan TPP	56 SKPD	56 SKPD						
		jumlah laporan Pelaksanaan pengolahan pemberian penghargaan PTT	6 Laporan	6 Laporan						
		jumlah Dokumen Menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi IWP 8%	12 Dokumen	12 Dokumen						
		jumlah DokumenMenyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi JKK-JKM	12 Dokumen	12 Dokumen						
		jumlah DokumenPelaksanaan pengelolaan database gaji ASN	12 Dokumen	12 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100 dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	100 dokumen	100%

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemo tongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemo tongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemo tongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	600 laporan	0	300 laporan	300 laporan	100%	300 Laporan	600 laporan	100%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemo tongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemo tongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	536 Dokumen	0	268 Dokumen	268 Dokumen	100%	268 Dokumen	536 Dokumen	100%

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk tehnik Adiministrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	21 Dokumen	1 peraturan	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	21 dokumen	100%
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 orang	0	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	200 orang	100%
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	36 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 Dokumen	4 laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 dokumen	100%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	21 Laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	21 laporan	100%

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 dokumen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Prosentase penyelesaian dokumen kerugian daerah	100%	100%						
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	8 Dokumen	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	100%
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			100%
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100%

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD Akhir tahun (Unaudited dan Audited) yang disusun sesuai dengan standar		5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%			
	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang					100 orang		100%
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Prosentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daeran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%						
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	0	2 laporan	2 laporan	100%	2 Laporan	2 laporan	100%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Prosentase jumlah dana bantuan keuangan yang di salurkan	100%	100%						
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7 Laporan	0	7 laporan	7 laporan	100%	7 Laporan	7 laporan	100%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase jumlah dana darurat yang direalisasikan	80%	80%						
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	0	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Laporan	10 dokumen	100%

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Prosentase dana bagi hasil Kabupaten/Kota yang disalurkan	100%	100%						
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Laporan	0	3 laporan	3 laporan	100%	3 Laporan	3 laporan	100%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar</b>	86%	84%	86%	86%	100%	86%	86%	100%
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD	180 Dokumen	60 dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	60 Dokumen	220 Dokumen	122.2%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase perbandingan dokumen Sertifikat Tanah yang Terbit terhadap total aset tanah	11%	11%						
		Jumlah laporan hasil Pengamanan BMD	1000 Laporan	0	500 laporan	235 laporan	47%	500 laporan	735 laporan	100%

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	678 dokumen	226 Dokumen	226 Dokumen	226 Dokumen	100%	226 Dokumen	678 dokumen	100%
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian lap. BMD PD dengan LRA dan Bidang Aset	100%	100%						
		Jumlah laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan BMD	8 Laporan	0	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	100%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD yang sesuai ketentuan	12 Laporan	4 Laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	100%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah</b>	4%	4%	2%	-2.37%	-1186%	2%	2%	50%
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	1. IKM/SKM Layanan Pajak Daerah	0,103472222	0,102777778	80	87.08.00	108.85	0,097916667	0,102777778	1.98%
		2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.4%	2.5%	3%	5%	167%	2.3%	2.5%	2.125%
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	37%	37%					
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 dokumen	100%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah kebijakan pajak daerah	6 dokumen dan 36 dokumen kebijakan	2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan	2 dokumen dan 12 dokumen kebijak	2 dokumen dan 12 dokumen kebijak	100%	2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan	6 dokumen dan 36 dokumen kebijakan	100%

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	16 Laporan	0	8 laporan	8 laporan	100%	8 Laporan	16 laporan	100%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah penerbitan dokumen SPOP/ NPWPD/ SPTPD	450 Dokumen	450 Dokumen						
		Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata dan didaftarkan di UPT 1	275 Obyek Pajak	275 Obyek Pajak						
		Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata dan didaftarkan di UPT 2	175 Obyek Pajak	175 Obyek Pajak						
		Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	30 laporan	0	15 laporan	15 laporan	100%	15 laporan	30 laporan	100%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Basis data objek pajak daerah yang dikelola	801.123	801.123						
		Jumlah laporan hasil Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah	106 Laporan	0	53 Laporan	53 Laporan	100%	53 Laporan	106 laporan	100%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan	757000 SPPT PBB-P2	757000 SPPT PBB-P2						



**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan (< Rp.500.000)	8702SPP T PBB-P2	8702SPPT PBB-P2						
		Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi	7000 SSPD BPHTB	7000 SSPD BPHTB						
		Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan (> Rp.500.000) UPT 1	5725 SPPT PBB-P2	5725 SPPT PBB-P2						
		Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan (> Rp.500.000) UPT 2	2977 SPPT PBB-P2	2977 SPPT PBB-P2						
		JUmlah objek pajak yang di sesuaikan NJOPnya	10.000 objek Pajak	0	5000 objek Pajak	5000 objek Pajak	100%	5000 objek Pajak	10.000 objek pajak	100%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2.403.369 Dokumen	801.123 dokumen	801.123 Dokumen	801.123 Dokumen	100%	801.123 Dokumen	2.403.369 Dokumen	100%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Wajib Pajak yang dilayani dan berkonsultasi	7600 WP	8000 WP						
		Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4 Layanan	0	2 layanan	2 layanan	100%	2 Layanan	4 layanan	100%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	162 dokumen	54 dokumen	54 dokumen	54 dokumen	100%	54 dokumen	162 dokumen	100%
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen terkait penagihan pajak daerah yang diterbitkan (STPD, Surat teguran, Surat Paksa, Surat penyitaan)	9099 dokumen	9099 dokumen						

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Jumlah Dokumen terkait penagihan pajak daerah yang disampaikan (STPD) UPT 1	1259 dokumen	1300 dokumen						
		Jumlah Dokumen terkait penagihan pajak daerah yang disampaikan (STPD) UPT 2	840 dokumen	880 dokumen						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	17.980 Dokumen		8990 Dokumen	8990 Dokumen	100%	8990 Dokumen	17.980 dokumen	100%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Presentase penyelesaian pengajuan keberatan pajak	100%	100%						
		Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak Daerah	20 Dokumen	0	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	20 dokumen	100%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah	130 Dokumen	24 laporan	53 Laporan	53 Laporan	100%	53 laporan	130 dokumen	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	7 Laporan	3 Laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 Laporan	7 laporan	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator Tujuan dan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator Opini BPK telah berhasil diraih selama 9 kali dengan opini WTP. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi pengampu, koordinator, dari hasil proses untuk menuju Opini BPK, dengan laporan Keuangan Audit dan Non Audit.

Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dengan indikator Laporan Keuangan dengan opini WTP, hal ini telah telah menjadi Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Akuntansi dengan pelaporan Keuangan yang baik, sesuai sistem dan ketentuan yang berlaku.

Di tahun 2021, BPKPD mengalami perubahan program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja. Perubahan tersebut berdampak kepada tidak dapat dibandingkannya target kinerja di tahun sebelum 2021 dengan diatas tahun 2021. Pada tabel 2.1, untuk kolom "Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021" apabila terisi 0, disebabkan karena sub kegiatan tersebut tidak dipakai di tahun 2021 ataupun terdapat perbedaan indicator antar tahunnya sehingga kinerja tidak dapat dibandingkan dan ditambahkan.

Di tahun 2022, sub kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan proses pengamanan Barang Milik Daerah masih sampai di Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun hal tersebut telah dievaluasi dan akan diatasi dengan meningkatkan koordinasi dengan BPN. Proses tersebut mengakibatkan target pengamanan BMD tidak mencapai target. Di

tahun yang sama target persentase peningkatan pendapatan daerah juga tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan bagian lain-lain pendapatan yang sah, baik dalam hal hibah maupun dana darurat. Penurunan yang sangat drastis tersebut sangat berdampak terhadap tidak tercapainya target persentase peningkatan pendapatan, walaupun pada Pendapatan Asli Daerah serta Pendapatan transfer, mengalami peningkatan.

Tabel 2.1A

Tabel 2.1.A			
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023			
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66,6%	Indikator yang digunakan pada tahun 2021 berbeda dengan indikator di tahun 2022 dan 2023	Peningkatan koordinasi terkait perencanaan terkait program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	83,3%	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dibawah target, dikarenakan penyedia pelatihan dari pihak luar yang tidak dapat diperkirakan secara detail	Peningkatan koordinasi terkait pelatihan pegawai
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%		

Kantor			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66,6%	Di tahun 2021, sub kegiatan ini tidak ada	Realisasi dilaksanakan di tahun berikutnya
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66,6%	Di tahun 2021, sub kegiatan ini tidak ada	Realisasi dilaksanakan di tahun berikutnya
Pengadaan Mebel	100%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50%	Indikator yang digunakan pada tahun 2022 berbeda dengan indicator di tahun 2021 dan 2023	Peningkatan koordinasi terkait perencanaan terkait program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indicator dan target
Pemeliharaan Mebel	100%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66,6%	Indikator yang digunakan pada tahun 2021 berbeda dengan indicator di tahun 2022 dan 2023	Peningkatan koordinasi terkait perencanaan terkait program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indicator dan target
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	100%		
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	100%		
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%		

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%		
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%		
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	100%		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%		
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100%		
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%		
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100%		
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%		
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	100%		
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%		
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100%		
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	100%		

Kerugian Daerah			
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%		
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%		
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%		
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	100%		
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	100%		
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%		
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%		
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	100%		
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	100%		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	122.2%		
Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%		
Pengamanan Barang Milik Daerah	100%		
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%		
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%		
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	50%	adanya anggaran pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah	meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pajak dan retribusi
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	1. 98% 2. 125%		
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100%		
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100%		
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%		
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100%		
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%		
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100%		
Penetapan Wajib Pajak Daerah	100%		
Pelayanan dan Konsultasi Pajak	100%		

Daerah			
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100%		
Penagihan Pajak Daerah	100%		
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100%		
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100%		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%		



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsinya merupakan *leading sector* dalam pengelolaan keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sebagai *leading sector* tersebut terjabarkan dalam fungsi :

- a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
- b. Penghimpunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan,
- c. Penghimpunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan,
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan,
- e. Penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
- f. Pengelolaan Asset Daerah,
- g. Pengelolaan Investasi Daerah,
- h. Pengelolaan Pajak Daerah,
- i. Sebagai Leading Sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 2.2 (T-C 30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKPD**  
**Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>2018-2023</b>											
	Opini BPK			WTP	WTP			WTP				
	Laporan Keuangan dengan opini WTP			WTP	WTP			WTP				
	Nilai Sakip PD			81	83			82,87				
			Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan					8,36%				
			Rasio PAD					22,42%				
			Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditure)					86,82%				
			Opini Laporan Keuangan					WTP				

			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD					-5,35%				
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD					9,76%				
			Manajemen Aset					2731023				
			Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)					Ya				
			Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)					Ya				
			Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)					Ya				
			Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)					Ya				

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya					9,87%				
	<b>2024-2026</b>											
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah					70	72			70	72	
	Indeks Pengelolaan Aset					85	90			85	90	
	Presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah					20,65	21,65			20,65	21,65	
	Porsentase hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas.					90%	95%			90%	95%	

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

	Porsentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu					95%	97%			95%	97%	
	Prosentase SKPD yang melakukan pengelolaan asset sesuai ketentuan					96%	98%			96%	98%	
	Prosentase peningkatan PAD					3.5%	3.75%			3.5%	3.75%	
	SAKIP					83.5	84			83.5	84	
			Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan			9,17%	9,26%			9,17%	9,26%	
			Rasio PAD			20,04%	20,23%			20,04%	20,23%	
			Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditure)			77,08%	77,34%			77,08%	77,34%	
			Opini Laporan Keuangan			WTP	WTP			WTP	WTP	

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD			-7,85%	-7,50%			-7,85%	-7,50%	
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			1,50%	1,85%			1,50%	1,85%	
			Manajemen Aset			2.790.105	2.851.487			2.790.105	2.851.487	
			Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)			Ya	Ya			Ya	Ya	
			Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)			Ya	Ya			Ya	Ya	
			Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)			Ya	Ya			Ya	Ya	
			Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)			Ya	Ya			Ya	Ya	

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya			1,98%	2,14%			1,98%	2,14%	
--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	-------	-------	--

Tujuan Renstra 2018-2023 adalah meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator berupa Opini BPK. Sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator Laporan Keuangan dengan opini WTP yang artinya bahwa Jenis opini BPK terhadap hasil laporan keuangan Daerah (Opini WTP)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP OPD yang artinya bahwa Keselarasan antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi.

Sasaran tersebut didukung oleh:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah serta Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah memiliki indikator Persentase penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu.

Dengan Formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Pengajuan anggaran yang di selesaikan}}{\text{Jumlah semua Dokumen Pengajuan}} * 100$$

- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah memiliki indikator IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah, dengan penjelasan Kepuasan OPD terhadap layanan perbendaharaan terkait dengan Dokumen dan pencairan anggaran.



- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki indikator Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standart artinya bahwa Laporan keuangan Daerah di susun sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah.
2. Program pengelolaan pendapatan daerah dengan rincian kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah. Kegiatan tersebut yang indikatornya adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan IKM/SKM Layanan Pajak Daerah.
  3. Program pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai stándar.
- Di tahun 2022, target untuk indikator Opini BPK dan Laporan Keuangan dengan opini WTP adalah WTP. Target ini tercapai di tahun 2022. Untuk indikator nilai SAKIP, pada tahun 2022 memiliki target 81, dan tercapai di tahun 2022 dengan nilai 82,87. Indikator Kinerja Kunci di tahun 2022 tidak memiliki target dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga untuk tahun 2022 target IKK menjadi “Zero Target”.

Tujuan dan sasaran Renstra 2024-2026 mengalami banyak perubahan dibandingkan renstra tahun 2018-2023. Di Renstra 2024-2026, tujuan Renstra yaitu:

“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah”

Indikator tujuan dari tujuan renstra 2024-2026 tersebut adalah:

1. Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah,
2. Indeks Pengelolaan Aset
3. Presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

Terkait sasaran renstra juga mengalami perubahan. Sasaran pada renstra 2024-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Perencanaan penganggaran keuangan daerah

Indikator: Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas.

2. Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah

Indikator: Persentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu

3. Meningkatnya manajemen aset yang akuntabel

Indikator: Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan asset sesuai ketentuan

4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator: Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan asset sesuai ketentuan

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD.

Indikator: Nilai SAKIP.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

Isu-isu penting merupakan fokus permasalahan pokok yang harus mendapatkan jawaban melalui prioritas program yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Isu penting yang ingin diangkat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), diantaranya dengan merevitalisasi kebijakan terkait pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah melalui pemeriksaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah.
2. Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melakukan inventarisasi asset yang belum tercatat dan mengidentifikasi penggunaan/pemanfaatannya serta pengamanan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Melaksanakan tertib Administrasi Pelaksanaan Akuntansi yang berbasis akrual dengan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
4. Melaksanakan tertib administrasi penyusunan anggaran terhadap OPD di Kabupaten Pasuruan.

Dengan memunculkan isu-isu penting sebagaimana dikemukakan diatas, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan-tujuan yang dituangkan dalam program kerja.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026 dan RPJPD 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD 2019 - 2024 Provinsi Jawa Timur. Rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan mencakup: Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.

Adapun Penyusunan Rancangan Renja Badan pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2024 telah mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan. Ada beberapa kegiatan tambahan yang dituangkan dalam Renja OPD yakni kegiatan yang tidak menyangkut publik tetapi yang berkaitan dengan administrasi perkantoran dan aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 Badan pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan disajikan pada Tabel T-C.31.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : BPKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen administrasi PD yang baik	95%	74.708.145.221	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen administrasi PD yang baik	95%	15.000.000.000,00	
2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	97%	499.524.000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	97%	90.000.000,00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	12 Dokumen	278.872.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	50.000.000,00	

			Daerah								
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	220.652.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	40.000.000,00	
5	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	98%	69.412.402.211	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	98%	13.776.300.000,00	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	67.429.438.211	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	13.396.300.000,00	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	1.982.964.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	380.000.000,00	

8	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	494.533.750	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	70.000.000,00
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	494.533.750	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	70.000.000,00
10	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	1.102.780.500	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	320.700.000,00
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	43.984.860	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	65.000.000,00

12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	123.884.260	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	70.500.000,00
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	373.301.470	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	60.000.000,00
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	77.458.230	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	15.000.000,00
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	90.074.740	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	18.000.000,00
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	35.577.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	7.200.000,00



17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	358.499.940	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	85.000.000,00
18	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	989.440.470	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	228.000.000,00
19	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	600.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	160.000.000,00

21	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	89.440.470	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	10.000.000,00	
22	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	89.440.470	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	8.000.000,00	0
23	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	98%	477.037.200	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	98%	253.000.000,00	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	450.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	-	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	273.737.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	210.000.000,00	

26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	2.850.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	3.000.000,00
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	40.000.000,00
28	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	<b>Persentase BMD kondisi baik</b>	<b>100%</b>	1.732.427.090	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	<b>Persentase BMD kondisi baik</b>	<b>100%</b>	262.000.000,00

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	<b>25 unit</b>	84.463.600,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	<b>25 unit</b>	10.000.000,00
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	714.745.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	142.000.000,00
31	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	24.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000,00
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	45.000.000,00

33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	709.218.290	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	60.000.000,00
----	--	---------------	--	--------	-------------	--	---------------	--	--------	---------------

34	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Kab. Pasuruan	1. Porsentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku	1. 95%	664.794.079.776	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Kab. Pasuruan	1. Porsentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku	1. 95%	667.386.190.421,00
			2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku	2. 100%				2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku	2. 100%	
			3. Porsentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu	3. 100%				3. Porsentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu	3. 100%	

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

35	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Prosentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen anggaran daerah tepat waktu	100%	<b>2.634.204.288</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Prosentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen anggaran daerah tepat waktu	100%	2.494.204.310,00
36	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	321.413.954	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	321.413.954,00
37	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	237.064.536	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	237.064.536,00
38	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	140.030.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	140.030.000,00
39	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	158.381.800	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	158.381.800,00

40	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Pasuruan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.167.196.894	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Pasuruan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.167.196.894,00
41	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Pasuruan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	260.006.054	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Pasuruan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	260.006.054,00
42	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	139.999.980	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	0	-



43	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	210.111.070	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	210.111.070,00
44	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Prosentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan	100%	<b>1.589.628.705</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Prosentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan	100%	1.719.679.165,00
45	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	296.441.349	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	369.441.349,00

46	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	942.323.856	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	999.374.316,00
47	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	52.748.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	2 Laporan	52.748.500,00

		dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

48	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	268 Dokumen	44.885.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	268 Dokumen	44.885.000,00
49	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	59.980.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	59.980.000,00

50	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	193.250.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	193.250.000,00
51	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	<b>1.073.209.208</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.097.965.000,00
52	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	114.114.048	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	164.115.000,00

53	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	116.654.840	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	121.820.000,00
54	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	277.000.975	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	302.000.000,00

55	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	247.392.350	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	197.300.000,00
56	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	66.829.820	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	57.000.000,00

57	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	55.486.500	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	-
58	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	57 Orang	195.730.675	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	57 Orang	255.730.000,00
59	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Prosentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	<b>659.497.037.575</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Prosentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	662.074.340.946,00



**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

60	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	323.605.334	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	323.605.334,00
61	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7 Laporan	573.973.552.573	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7 Laporan	576.550.856.944,00
62	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	38.192.672.300	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	38.192.672.300
63	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Laporan	47.007.207.368	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Laporan	47.007.207.368

64	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Kab. Pasuruan	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100%	4.210.350.473	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Kab. Pasuruan	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100%	785.192.478,00
65	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	100%	4.210.350.473	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Kab. Pasuruan	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	100%	785.192.478,00
66	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	107.249.938	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	21.318.478,00
67	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	5.000.000,00
68	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	832.588.700	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	160.490.000,00

69	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	2.496.525.604	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	491.222.000,00
70	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	160.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	5.000.000,00
71	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	226 Dokumen	317.629.931	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	226 Dokumen	63.133.000,00

72	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	87.279.400	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	17.348.000,00
73	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	109.076.900	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	21.681.000,00
74	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Kab. Pasuruan	Prosentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	2%	13.768.134.767	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Kab. Pasuruan	Prosentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	2%	4.705.966.948,00
75	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	1. Jumlah Wajib Pajak 2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	1. 150 2. 1%	13.768.134.767	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Kab. Pasuruan	1. Jumlah Wajib Pajak 2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	1. 150 2. 1%	4.705.966.948,00

76	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	139.999.980	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	47.852.181,00
77	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	550.707.018	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	188.232.398,00
78	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	600.048.920	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	205.097.526,00

79	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	3.319.676.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1.134.669.714,00
80	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	428.220.720	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	146.366.417,00
81	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Pasuruan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7.868 Obyek Pajak	2.307.362.690	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Pasuruan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7.868 Obyek Pajak	788.659.665,00
82	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	918.744 Dokumen	1.710.093.480	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	918.744 Dokumen	584.512.249,00

83	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	193.231.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	66.046.615,00
84	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Laporan	1.135.165.551	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Laporan	388.001.109,00
85	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8990 Dokumen	1.845.071.578	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8990 Dokumen	630.647.942,00
86	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11 Dokumen	69.999.930	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11 Dokumen	23.926.070,00

87	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	53 Dokumen	1.299.357.400	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	53 Dokumen	444.122.104,00
88	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	169.200.500	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	57.832.958,00



Berdasarkan tabel diatas rancangan anggaran awal dan hasil evaluasi, mengalami perbedaan. Hal ini dikarenakan anggaran yang tercantum pada kolom rancangan awal RKPD merupakan proyeksi awal atas kebutuhan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, sedangkan pada kolom hasil analisis kebutuhan, anggaran yang tercantum telah menyesuaikan dengan anggaran pada RPD. Anggaran RPD untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.667.386.190.421. Anggaran RPD untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp.785.192.478. Anggaran RPD untuk Program Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.705.966.948. Anggaran RPD untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp.15.000.000.000.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memuat Program dan Kegiatan yang bersifat pelayanan baik dari Internal maupun external bukan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat serta pemangku kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Jadi Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Pasuruan tidak ada usulan Program dan kegiatan dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Tabel. 3.2  
 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan  
 Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah

No.	Program/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5em;">Nihil</div>					

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

### 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Pembuatan renja 2024 tidak lepas dari upaya mewujudkan Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi” serta sasaran Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tanggung Jawab Keuangan Daerah adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;

2. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
3. Struktur APBD;
4. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
5. Penyusunan dan penetapan APBD;
6. Pelaksanaan dan perubahan APBD;
7. Penatausahaan keuangan daerah;
8. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
9. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
10. Pengelolaan kas umum daerah;
11. Pengelolaan piutang daerah;
12. Pengelolaan investasi daerah;
13. Pengelolaan barang milik daerah;
14. Pengelolaan dana cadangan;
15. Pengelolaan utang daerah;
16. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
17. Penyelesaian kerugian daerah;
18. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
19. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

”Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.”

Indikator kinerja untuk tujuan tersebut adalah:

1. Indeks Pengelolaan Keuangan daerah
2. Indeks Pengelolaan Aset
3. Presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Perencanaan penganggaran keuangan daerah.  
Indikator : persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas.
2. Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah, dengan indikator kinerja Porsentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu.
3. Meningkatnya Manajemen aset yang akuntabel, dengan indikator kinerja persentase SKPD yang melakukan pengelolaan asset sesuai ketentuan
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) , dengan indikator kinerja persentase peningkatan PAD, dan
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD, dengan indikator kinerja nilai SAKIP.

**Tabel 3.2**  
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Formulasi/Penjelasan
<b>Tujuan</b>					
Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja dan keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP		
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			70	Kriteria: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 4. Penyerapan anggaran 5. Kondisi keuangan daerah 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2020)
	Indeks Pengelolaan Aset			85	1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif a. hasil pemeriksaan BPK atas LKPD

				<p><i>jumlah temuan tidak terkait BMD</i>  <i>jumlah temuan pada LKPD oleh BPK</i> x50%</p> <p>b. Realisasi pendapatan dari pengelolaan aset  <i>jumlah pendapatan dari pengelolaan aset</i>  <i>Nilai produktif aset yang dikelola</i> x50%</p> <p>2. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap Peraturan perundangan  a. Ketepatan waktu penyampaian laporan perencanaan  <i>jumlah laporan yang tepat waktu</i>  <i>jumlah laporan secara keseluruhan</i> x50%</p> <p>b. Asuransi BMD  <i>jumlah BMD yang akan diasuransikan</i>  <i>jumlah BMD yang diasuransikan</i> x50%</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif  a. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMD  <i>tindak lanjut temuan BPK terkait BMD</i>  <i>total temuan BPK terkait BMD</i> x50%</p> <p>b. tindak lanjut pengelolaan BMD  <i>BMD yang dikelola berkelanjutan</i>  <i>total BMD non persediaan</i> x50%</p> <p>4. Administrasi BMD yang handal  a. persentase BMD yang memiliki dokumen kepemilikan</p>
--	--	--	--	--



					$\frac{\text{Jumlah BMD yang memiliki dokumen kepemilikan}}{\text{jumlah BMD keseluruhan}} \times 50\%$
					$\frac{\text{b. penggunaan BMD yang sesuai ketentuan}}{\text{jumlah penggunaan BMD sesuai ketentuan}} \times 50\%$
	Presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah			20,65	$\frac{\text{jumlah PAD}}{\text{jumlah pendapatan daerah}} \times 100\%$
<b>Sasaran</b>					
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan dengan opini WTP	WTP	WTP		Hasil Opnini BPK
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip PD	82,87	83	83.5	Hasil LHE SAKIP
Meningkatnya Perencanaan penganggaran keuangan daerah	Porsentase hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas.			90%	$\frac{\text{1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD}}{\text{jumlah dokumen penganggaran SKPD keseluruhan}} \times 50\%$ $\frac{\text{2. Ketepatan prosedur tahapan penyusunan dokumen anggaran}}{\text{jumlah dokumen penganggaran secara keseluruhan}} \times 50\%$

Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah	Porsentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu			95%	$\frac{\text{jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dan selesai tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)}}{\text{jumlah laporan keuangan SKPD keseluruhan}} \times 100\%$
Meningkatnya Manajemen aset yang akuntabel	Prosentase SKPD yang melakukan pengelolaan asset sesuai ketentuan			96%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan laporan tepat waktu  <math display="block">\frac{\text{Jumlah laporan perencanaan aset yang tepat waktu}}{\text{jumlah laporan perencanaan aset secara keseluruhan}} \times 50\%</math> </li> <li>Tindak lanjut pengelolaan asset  <math display="block">\frac{\text{Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan aset berkelanjutan}}{\text{jumlah SKPD secara keseluruhan}} \times 50\%</math> </li> </ol>
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase peningkatan PAD			3.5%	$\frac{(\text{jumlah PAD tahun n}) - (\text{Jumlah PAD 2022})}{\text{jumlah PAD tahun 2022}} \times 100$

### **3.3. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 memiliki 4 program, 13 kegiatan, serta 70 sub kegiatan. Seluruh sub kegiatan dibiayai menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). Program, Kegiatan dan sub kegiatan BPKPD di tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, meliputi Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :**

##### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

##### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

##### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

##### **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

#### **5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pengadaan Mebel;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

#### **6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

#### **7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Mebel;
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## **II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;

- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- g. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

## **2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
- b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- d. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
- e. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;
- f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
- c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
- f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- a. Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
- b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
- c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
- d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

## **III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

### **1. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah;

- d. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- e. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- g. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- h. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;

#### **IV. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

##### **1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**

- a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- j. Penagihan Pajak Daerah;
- k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Terkait dengan tujuan BPKPD tahun 2024-2026, program yang menunjang tujuan tersebut yaitu program pengelolaan keuangan pemerintah daerah, program pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan. Sejalan dengan program yang menunjang tercapainya tujuan, program-program di BPKPD juga menunjang tercapainya sasaran BPKPD. Program yang menunjang sasaran yaitu:

1. Sasaran Meningkatnya Perencanaan penganggaran keuangan daerah
  - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
    - Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
    - Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
    - Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
2. Sasaran Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah
  - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
3. Sasaran meningkatnya manajemen asset yang akuntabel
  - Program pengelolaan barang milik daerah
4. Sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
  - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja PD
  - Program penunjang urusan pemerintahan daerah



Dalam mendukung terlaksananya Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, BPKPD tidak berperan secara langsung namun tetap memiliki peran yang penting dalam tercapainya tujuan tersebut. Sebagai OPD yang bertanggung jawab atas keuangan Kabupaten Pasuruan, BPKPD mendukung terlaksananya SDG's dalam bentuk penunjang unsur keuangan dan pendapatan.

- Melalui program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, BPKPD berperan dalam melakukan verifikasi SPM dan mengeluarkan anggaran dana yang diminta oleh OPD. Pada proses tersebut BPKPD menunjang pemenuhan anggaran kegiatan OPD terkait. Sehubungan dengan program pemerintah yang berkaitan dengan SDG's, anggaran untuk mendukung tercapainya hal tersebut akan dicairkan melalui BPKPD khususnya pada program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
- Melalui program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, BPKPD berperan dalam verifikasi dokumen penganggaran Kabupaten Pasuruan serta mengendalikan anggaran Kabupaten Pasuruan. Dokumen anggaran OPD yang didalamnya termasuk program mengenai SDG's akan melewati verifikasi oleh BPKPD. Anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai suatu program, juga melewati verifikasi oleh BPKPD khususnya pada program Pengelolaan Keuangan Daerah,

kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

- Melalui program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKPD bertanggung jawab atas penyaluran bantuan keuangan, pengelolaan dana darurat dan mendesak serta pengelolaan Dana Bagi Hasil kabupaten/kota. Di dalam dana tersebut terdapat dana yang dapat menunjang tercapainya Sustainable Development Goals, seperti dalam bantuan keuangan terdapat dana desa. Berdasarkan Permendes 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan tujuan SDG's yang meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diantaranya meliputi perbaikan dan konsolidasi data SDG's desa, perluasan akses layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.
- Melalui program Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat kegiatan yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut dapat digunakan dalam membiayai keperluan terlaksananya SDG's.
- Melalui program Pengelolaan Pendapatan Daerah, pajak dan retribusi daerah yang diterima akan menjadi PAD. PAD dapat digunakan untuk membiayai keperluan terlaksananya SDG's.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu yaitu terkait manajemen keuangan serta terkait perencanaan dan keuangan. IKK BPKPD yaitu:

1. Perencanaan dan Keuangan

a. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100 \%$$

Dokumen pendukung:

- Rekap data belanja pegawai non guru dan kesehatan Kabupaten Pasuruan tahun terkait
- LRA Kabupaten Pasuruan tahun terkait

b. Rasio PAD

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{jumlah PDRB non migas}} \times 100 \%$$

Dokumen pendukung:

- LRA Kabupaten Pasuruan tahun terkait

c. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$$

Dokumen pendukung:

- LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi Kabupaten Pasuruan tahun terkait

d. Opini Laporan Keuangan

Dokumen pendukung:

- Dokumen opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun terkait

2. Manajemen Keuangan

a. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Formula:

$$\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD dikurangi satu}} \times 100\%$$

Dokumen pendukung:

- Rekap anggaran tahun terkait dan tahun n-1
- LRA Kabupaten Pasuruan tahun terkait

b. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Formula:

$$\frac{\text{Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi}}{\text{total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100\%$$

Dokumen pendukung:

- Rekap anggaran tahun terkait dan tahun n-1
- LRA Kabupaten Pasuruan tahun terkait

c. Assets management

Formula:

- 1) Berapa jumlah asset yang dikelola?
- 2) Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)
- 3) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)

4) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?  
(Ya/Tidak)

5) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)

Dokumen pendukung:

- Rekapitulasi asset
- Laporan inventarisasi asset
- Data manual penyusunan asset tetap

d. Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Formula:

$$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Dokumen pendukung:

- Rekap anggaran tahun terkait dan tahun n-1

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024.

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen administrasi PD yang baik	Kab. Pasuruan	95%				15.000.000.000,00			97%	15.000.000.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan /subkegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	Kab. Pasuruan	97%				90.000.000,00			100%	104.900.040,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	12 Dokumen				50.000.000,00	DAU		12 Dokumen	58.563.120,00
							Belanja operasi	:	50.000.000,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	50.000.000,00	DAU		

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	2 Laporan			40.000.000,00			2 Laporan	46.336.920,00
							Belanja operasi	:	40.000.000,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	40.000.000,00	DAU		
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Pasuruan	98%				13.776.300.000,00	DAU	100%	13902310082
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	98 Orang/bulan				13.396.300.000,00	DAU	98 Orang/bulan	13.485.887.642,00
							Belanja operasi	:	13.396.300.000,00	DAU		
							Belanja pegawai	:	12.496.300.000,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	900.000.000,00	DAU		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	75 Dokumen				380.000.000,00	DAU	75 Dokumen	416.422.440,00
							Belanja operasi	:	380.000.000,00	DAU		
							Belanja pegawai	:	32.000.000,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	348.000.000,00	DAU		



**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Kab. Pasuruan	100%				70.000.000,00	DAU		100%	103.852.088,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pasuruan	160 Orang				70.000.000,00	DAU		160 Orang	103.852.088,00
							Belanja operasi	:	70.000.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	70.000.000,00	DAU			
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	Kab. Pasuruan	100%				320.700.000,00	DAU		100%	231.583.905,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	20 Paket				65.000.000,00	DAU		20 Paket	9.236.821,00
							Belanja operasi	:	65.000.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	65.000.000,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket				70.500.000,00	DAU		30 Paket	26.015.695,00
							Belanja operasi	:	70.500.000,00	DAU			
								:	15.000.000,00	DAU			
							Belanja modal	:	55.500.000,00	DAU			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasuruan	50 Paket				60.000.000,00	DAU		50 Paket	78.393.309,00
							Belanja operasi	:	14.600.000,00	DAU			
								:	14.600.000,00	DAU			
							Belanja modal	:	45.400.000,00	DAU			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	50 Paket				15.000.000,00	DAU		50 Paket	16.266.228,00
							Belanja operasi	:	15.000.000,00	DAU			
								:	15.000.000,00	DAU			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	20 Paket				18.000.000,00	DAU		20 Paket	18.915.695,00

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

						Belanja operasi	:	18.000.000,00	DAU		
						Belanja barang dan jasa	:	18.000.000,00	DAU		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	30 Laporan			7.200.000,00	DAU	25 Laporan	7.471.170,00
						Belanja operasi	:	7.200.000,00	DAU		
						Belanja barang dan jasa	:	7.200.000,00	DAU		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	180 Laporan			85.000.000,00	DAU	180 Laporan	75.284.987,00
						Belanja operasi	:	85.000.000,00	DAU		
						Belanja barang dan jasa	:	85.000.000,00	DAU		
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	Kab. Pasuruan	100%			228.000.000,00	DAU	100%	215.529.029,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	1 Unit			50.000.000,00	DAU	1 Unit	63.000.000,00
						Belanja modal	:	50.000.000,00	DAU		

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	4 Unit			160.000.000,00	DAU		4 Unit	126.000.000,00
						Belanja modal	:	160.000.000,00	DAU			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pasuruan	20 Unit			10.000.000,00	DAU		20 Unit	18.782.499,00
						Belanja modal	:	10.000.000,00	DAU			
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		10 unit			8.000.000,00			10 unit	27.746.530,00
						Belanja modal	:	8.000.000,00				
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Kab. Pasuruan	98%			253.000.000,00	DAU		98%	102.277.812,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasuruan	30 Laporan			210.000.000,00	DAU		30 Laporan	49.584.812,00
						Belanja operasi	:	210.000.000,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

							Belanja barang dan jasa	:	210.000.000,00	DAU		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	10 Laporan				3.000.000,00	DAU	10 Laporan	693.000,00
							Belanja operasi	:	3.000.000,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	3.000.000,00	DAU		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	50 Laporan				40.000.000,00	DAU	50 Laporan	32.000.000,00
							Belanja operasi	:	40.000.000,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	40.000.000,00	DAU		
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD kondisi baik	Kab. Pasuruan	100%				262.000.000,00	DAU	100%	339.547.045,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasuruan	25 unit				10.000.000,00	DAU	25 unit	17.737.356,00

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

						Belanja operasi	:	10.000.000,00	DAU			
							:	10.000.000,00	DAU			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasuruan	80 Unit			142.000.000,00	DAU		80 Unit	150.096.492,00
						Belanja operasi	:	142.000.000,00	DAU			
							:	142.000.000,00	DAU			
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	20 Unit			5.000.000,00	DAU		20 Unit	5.040.000,00
						Belanja operasi	:	5.000.000,00	DAU			
							:	5.000.000,00	DAU			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	100 Unit			45.000.000,00	DAU		100 Unit	42.000.000,00
						Belanja operasi	:	45.000.000,00	DAU			
							:	45.000.000,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	5 unit			60.000.000,00	DAU		5 unit	124.673.197,00
						Belanja operasi	:	60.000.000,00	DAU			
						Belanja barang dan jasa	:	60.000.000,00	DAU			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>1. Porsentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku</b> <b>2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b> <b>3. Porsentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu</b>		<b>Kab. Pasuruan</b>	<b>1. 95%</b> <b>2. 100%</b> <b>3. 100%</b>			<b>667.386.190.421</b>	<b>DAU</b>		<b>1. 97%</b> <b>2. 100%</b> <b>3. 100%</b>	<b>738.108.926.323</b>

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Prosentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen anggaran daerah tepat waktu	Kab. Pasuruan	100%				2.494.204.308,00	DAU		100%	5.795.249.430,00
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Pasuruan	4 Dokumen				321.413.954,00	DAU		4 Dokumen	707.110.698,00
							Belanja operasi	:	321.413.954,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	321.413.954,00	DAU			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Pasuruan	4 Dokumen				237.064.536,00	DAU		4 Dokumen	521.541.978,00
							Belanja operasi	:	237.064.536,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	237.064.536,00	DAU			
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Pasuruan	60 Dokumen				140.030.000,00	DAU		60 Dokumen	308.066.000,00
							Belanja operasi	:	140.030.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	140.030.000,00	DAU			



**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Pasuruan	60 Dokumen				158.381.800,00	DAU		60 Dokumen	348.439.960,00
							Belanja operasi	:	158.381.800,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	158.381.800,00	DAU			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Pasuruan	2 Dokumen				1.167.196.894,00	DAU		2 Dokumen	2.567.833.166,00
							Belanja operasi	:	999.233.914,00	DAU			
							Belanja pegawai	:	560.620.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	438.613.914,00	DAU			
							Belanja modal	:	167.962.980,00	DAU			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Pasuruan	2 Dokumen				260.006.054,00	DAU		2 Dokumen	572.013.318,00
							Belanja operasi	:	260.006.054,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

							Belanja pegawai	:	260.006.054,00	DAU		
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	100 Orang				210.111.070,00	DAU	100 Orang	770.244.310,00
							Belanja operasi	:	210.111.070,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	210.111.070,00	DAU		
		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Prosentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan	Kab. Pasuruan	100%				1.719.679.165,00	DAU	100%	<b>3.179.257.410,00</b>
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Pasuruan	12 Dokumen				369.441.349,00	DAU	12 Dokumen	592.882.698,00
							Belanja operasi	:	296.441.349,00	DAU		
							Belanja pegawai	:	25.080.000,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	271.361.349,00	DAU		
							Belanja modal	:	73.000.000,00	DAU		

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Pasuruan	50 Dokumen			999.374.316,00	DAU		50 Dokumen	1.884.647.712,00
							Belanja operasi	:	999.374.316,00	DAU			
							Belanja pegawai	:	9.660.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	989.714.316,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Pasuruan	2 Laporan			52.748.500,00	DAU		2 Laporan	105.497.000,00
							Belanja operasi	:	52.748.500,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	52.748.500,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Pasuruan	268 Dokumen			44.885.000,00	DAU		268 Dokumen	89.770.000,00
							Belanja operasi	:	44.885.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	44.885.000,00	DAU			
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Pasuruan	1 Dokumen			59.980.000,00	DAU		1 Dokumen	119.960.000,00
							Belanja operasi	:	59.980.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	59.980.000,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	100 Orang				193.250.000,00	DAU		100 Orang	386.500.000,00
						Belanja operasi	:		193.250.000,00	DAU			
						Belanja barang dan jasa	:		193.250.000,00	DAU			
		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	Kab. Pasuruan	100%				1.097.965.000,00	DAU		100%	<b>2.146.418.416,00</b>
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Pasuruan	12 Laporan				164.115.000,00	DAU		12 Laporan	228.228.096,00
						Belanja operasi	:		139.115.000,00	DAU			
						Belanja pegawai	:		7.980.000,00	DAU			
						Belanja barang dan jasa	:		106.135.000,00	DAU			
						Belanja modal	:		25.000.000,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Pasuruan	4 Dokumen				121.820.000,00	DAU		4 Dokumen	233.309.680,00
							Belanja operasi	:	121.820.000,00	DAU			
							Belanja pegawai	:	8.820.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	113.000.000,00	DAU			
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Pasuruan	7 Laporan				302.000.000,00	DAU		7 Laporan	554.001.950,00
							Belanja operasi	:	277.000.000,00	DAU			
							Belanja pegawai	:	8.820.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	268.180.000,00	DAU			
							Belanja modal	:	25.000.000,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	4 Dokumen				197.300.000,00	DAU		4 Dokumen	494.784.700,00
						Belanja operasi	:		197.300.000,00	DAU			
						Belanja barang dan jasa	:		197.300.000,00	DAU			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Pasuruan	4 Dokumen				57.000.000,00	DAU		4 Dokumen	133.569.640,00
						Belanja operasi	:		57.000.000,00	DAU			
						Belanja barang dan jasa	:		57.000.000,00	DAU			



**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	57 Orang		255.730.000,00	DAU		57 Orang	502.434.350,00
							Belanja operasi	:	255.730.000,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	255.730.000,00	DAU		
		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Prosentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Pasuruan	100%				662.074.341.948,00	DAU	100%	<b>725.597.001.066,00</b>
		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	2 Laporan				323.605.334,00	DAU	2 Laporan	647.210.668,00
							Belanja operasi	:	323.605.334,00	DAU		

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

							Belanja barang dan jasa	:	323.605.334,00	DAU		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Pasuruan	7 Laporan				576.550.856.946,00	DAU	7 Laporan	601.557.238.430,00
							Belanja operasi	:	4.000.000.000,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	4.000.000.000,00	DAU		
							Belanja transfer	:	572.550.856.946,00	DAU		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Pasuruan	10 Laporan				38.192.672.300,00	DAU	10 Laporan	76.385.344.600,00
							Belanja tidak terduga	:	38.192.672.300,00	DAU		
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	3 Laporan				47.007.207.368,00	DAU	3 Laporan	47.007.207.368,00
							Belanja transfer	:	47.007.207.368,00	DAU		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus</b>	<b>Kab. Pasuruan</b>	<b>100%</b>				<b>785.192.478,00</b>	<b>DAU</b>	<b>100%</b>	<b>1.391.000.000,00</b>

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	Kab. Pasuruan	100%				785.192.478,00	DAU		100%	1.391.000.000,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	112 Dokumen				21.318.478,00	DAU		112 Dokumen	35.392.480,00
							Belanja operasi	:	21.318.478,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	21.318.478,00	DAU			
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	12 Dokumen				5.000.000,00	DAU		12 Dokumen	33.000.000,00
							Belanja operasi	:	5.000.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	5.000.000,00	DAU			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	4 Laporan				160.490.000,00	DAU		4 Laporan	274.754.271,00
							Belanja operasi	:	160.490.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	160.490.000,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	500 Laporan				491.222.000,00	DAU		500 Laporan	823.853.449,00
							Belanja operasi	:	491.222.000,00	DAU			
								:	491.222.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	491.222.000,00	DAU			
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	12 Laporan				5.000.000,00	DAU		12 Laporan	52.800.000,00
							Belanja operasi	:	5.000.000,00	DAU			
								:	5.000.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	5.000.000,00	DAU			
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	226 Dokumen				63.133.000,00	DAU		226 Dokumen	104.817.877,00
							Belanja operasi	:	63.133.000,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

							Belanja barang dan jasa	:	63.133.000,00	DAU		
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	4 Laporan				17.348.000,00	DAU	4 Laporan	30.386.546,00
							Belanja operasi	:	17.348.000,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	17.348.000,00	DAU		
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab. Pasuruan	4 Laporan				21.681.000,00	DAU	4 Laporan	35.995.377,00
							Belanja operasi	:	21.681.000,00	DAU		
							Belanja barang dan jasa	:	21.681.000,00	DAU		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Prosentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah</b>	<b>Kab. Pasuruan</b>	<b>0,015</b>				<b>4.705.966.948,00</b>	<b>DAU</b>	<b>2,00%</b>	<b>5.315.000.000,00</b>

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	1. Jumlah Wajib Pajak 2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	Kab. Pasuruan	1. 150 2. 1%				4.705.966.946,00	DAU		1, 250 2, 1,5%	5.315.000.000,00
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	2 Dokumen				47.852.181,00	DAU		2 Dokumen	48.999.993,00
							Belanja operasi	:	47.852.181,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	47.852.181,00	DAU			
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	12 Dokumen				188.232.398,00	DAU		20 Dokumen	212.022.202,00
							Belanja operasi	:	188.232.398,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	188.232.398,00	DAU			
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	8 Laporan				205.097.526,00	DAU		8 Laporan	231.018.834,00

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

						Belanja operasi	:	180.097.526,00	DAU			
						Belanja pegawai	:	8.820.000,00	DAU			
						Belanja barang dan jasa	:	171.277.526,00	DAU			
						Belanja modal	:	25.000.000,00	DAU			
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	12 Laporan			1.134.669.714,00	DAU		12 Laporan	1.245.629.305,00
						Belanja operasi	:	1.134.669.714,00	DAU			
						Belanja pegawai	:	11.700.000,00	DAU			
						Belanja barang dan jasa	:	1.122.969.714,00	DAU			
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	12 Laporan			146.366.417,00	DAU		12 Laporan	175.759.459,00
						Belanja operasi	:	146.366.417,00	DAU			
						Belanja barang dan jasa	:	146.366.417,00	DAU			

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Pasuruan	7.868 Obyek Pajak				788.659.665,00	DAU		8,262 Obyek Pajak	1.010.650.568,00
							Belanja operasi	:	788.659.665,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	788.659.665,00	DAU			
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	918.744 Dokumen				584.512.247,00	DAU		1,007,902 Dokumen	615.633.653,00
							Belanja operasi	:	584.512.247,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	584.512.247,00	DAU			
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	2 Layanan				66.046.615,00	DAU		2 Layanan	76.519.800,00
							Belanja operasi	:	46.046.615,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	46.046.615,00	DAU			
							Belanja modal	:	20.000.000,00	DAU			
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Pasuruan	12 Laporan				388.001.109,00	DAU		12 Laporan	480.659.598,00



**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

						Belanja operasi	:	368.001.109,00	DAU		
						Belanja pegawai	:	10.722.600,00	DAU		
						Belanja barang dan jasa	:	357.278.509,00	DAU		
						Belanja modal	:	20.000.000,00	DAU		
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	8990 Dokumen			630.647.942,00	DAU	9100 Dokumen	664.225.768,00
						Belanja operasi	:	630.647.942,00	DAU		
						Belanja pegawai	:	9.660.000,00	DAU		
						Belanja barang dan jasa	:	620.987.942,00	DAU		
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	11			23.926.070,00	DAU	11	25.199.975,00
						Belanja operasi	:	23.926.070,00	DAU		
						Belanja barang dan jasa	:	23.926.070,00	DAU		

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	53 Dokumen				444.122.104,00	DAU		55 dokumen	467.768.664,00
							Belanja operasi	:	444.122.104,00	DAU			
							Belanja pegawai	:	9.660.000,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	434.462.104,00	DAU			
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pasuruan	2 Laporan				57.832.958,00	DAU		2 Laporan	60.912.180,00
							Belanja operasi	:	57.832.958,00	DAU			
							Belanja barang dan jasa	:	57.832.958,00	DAU			

Tabel T-C.19

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan  
Kabupaten Pasuruan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode P-Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan	100%	127.710.000.000	100%	97.737.958.688,00	100%	74.798.926.911	100%	2.439.845.071								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan BKD yang selaras dengan RPJMD	100%	55.000.000	100%	763.595.372,00	100%	499.524.000	100%	121.131.000								

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	30.000.000	7 Dokumen	515.358.872,00	7 Dokumen	278.872.000	2 Dokumen	121.131.000							
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	25.000.000	5 Dokumen	248.236.500,00	5 laporan	220.652.000	0	0							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji ASN	100%	124.687.000.000	100%	90.960.336.848,00	100%	69.412.402.211	1Dokumen	1.451.766.015							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 orang/bln	122.922.000.000	96 orng/bln	89.353.886.848,00	150 orng/bln	67.429.438.211	150 orng/bln	1.209.101.015							
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN	24 laporan	1.755.000.000	61 orng/bln	1.606.450.000,00	24 Dokumen	1.982.964.000	8 Dokumen	242.665.000							
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian BKD	100%	60.000.000	50%	39.720.000,00	100%	494.533.750	100%	1.200.000							
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	10 orang	60.000.000	5	39.720.000,00	10 Orang	494.533.750	1%	1.200.000							
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana umum	100%	470.000.000	100	1.512.466.621,00	100%	1.166.280.560	100%	20							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 paket	30.000.000	20 paket	73.568.000,00	20 paket	43.984.860	0	0							
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	18 paket	25.000.000	18 paket	204.158.380,00	18 paket	123.884.260	0	0							

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	150 paket	30.000.000	150 paket	398.410.000,00	150 paket	373.301.470	5 Paket	1.362.960							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang di sediakan			300 paket	211.422.412,00	300 paket	77.458.230	20 Paket	4.250.000							
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	10paket	75.000.000	10 Paket	87.033.340,00	10 Paket	90074740	1 Paket	2.250.000							
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 kali	60.000.000	25 laporan	68.951.900,00	25 laporan	35.577.000	5 laporan	8.591.850							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 lporan	350.000.000	80 laporan	468.922.589,00	80 laporan	422.000.000	23 Laporan	124.5553.787							
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD sesuai rencana	100%	320.000.000	100%	2.789.368.491,00	100%	1.084.004.700	100%	583.000.000							
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2 unit	493.000.000,00	0	0	0	0							
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan yang di sediakan	2 unit	40.000.000	1 unit	1.361.347.000,00	2 unit	767.589.420	1 unit	583.000.000							
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang di sediakan	2 unit	30.000.000	10 Paket	290.895.600,00	10 Paket	89.440.470	0	0							
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	30 unit	250.000.000	30 Unit	644.125.891,00	30 Unit	226.974.810	0	0							

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	323.000000	100%	421.534.255,00	100%	525.291.000	100%	114.415.384							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan surat menyurat	100 pucuk	5.000.000	100 pucuk	0	100 laporan	450.000	0	0							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20 rek/bln	250.000.000	20 rek/bln	228.398.265,00	20 rek/bln	273.737.200	5 rek/bln	73.889.884							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Perlengkapan Kantor	18 unit	28.000.000	18 laporan	0	18 unit	2.850.000	0	0							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang di sediakan	10 laporan	40.000.000	10 laporan	193.135.990,00	10 laporan	248.253.800	1 Laporan	40.525.500							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		795.000.000	100%	1.250.937.101,00	100%	1.616.890.690	100%	168.332.652							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	200.000.000	20 unit	57.205.843,00	20 unit	84.463.600	5 unit	20.724.612							

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya	50 unit	300.000.000	2 kali	487.857.730,00	2 unit	714.745.200	1 kali	99.928.040							
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		25.000.000	10 unit	8.000.000,00	10 unit	24.000.000		0							
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	70.000.000	30 unit	257.850.000,00	2 unit	219.816.000	6	47.680.00							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2kali	200.000.000	2 kali	440.023.528,00	30 kali	573.865.890	0	0							
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	738.2323.926.323	100%	178.316.297.164,00	100%	664.654.079.796	100%	178.316.297.164							
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu	100%	2.100.000.000	100%	1.719.742.047,00	100%	2.494.204.308	100%	244.192.072							
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang di susun	100%	225.000.000	2 dokumen	285.080.670,00	2 dokumen	321.413.954	0	68.439.572							
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang di susun	2	250.000.000	2 dokumen	138.741.915,00	2 dokumen	237.064.536	0	0							

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang di Verifikasi	2 Dokumen	50.000.000	58 RKA SKPD	53.534.781,00	58 dokumen	140.030.000	0	0						
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	2 Dokumen	50.000.000	58 RKA SKPD	50.742.873,00	58 dokumen	158.381.800	0	0						
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.150.000.000	2 dokumen	888.194.817,00	2 dokumen	1.167.196.894	1 dokumen	137.745.000						
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah tersusunnya dokumen Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	300.000.000	2 dokumen	111.478.326,00	2 dokumen	260.006.054	0	0						
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56 opd	75.000.000	100 orang	191.968.665,00	100 orang	210.111.070	25	38.007.500						
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah	90	1.215.000.000	80%	1.018.156.050,00	80%	1.589.628.705	100%	314.884.972						



**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pnnelolaan Kas Daerah	7000 Lapora n	300.000.0 00	24.20 0 Doku men	237.025.457,00	24.200 Dokumen	296.441.349	2159	32.285.720							
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 Lapora n	200.000.0 00	50 Doku men	578.757.943,00	50 Dokumen	942.323.856	15 dokum en	173.228.252							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	300 Lapora n	185.000.0 00	300 lapora n	26.932.000,00	300 laporan	52.748.500	91	8.030.000							
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			268 Doku men	17.790.000,00	268 Dokumen	44.885.000	56	7.474.500							

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			10 Dokumen	13.875.500,00	1 dokumen	59.980.000	0	0						
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			100 Orang	143.775.150,00	100 orang	193.250.000	50	93.866.500						
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	805.000.000	100%	1.009.230.600,00	100%	1.073.209.208	100%	173.868.600						
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	135.000.000	12 laporan	111.926.250,00	12 laporan	114.114.048	3	3.300.000						
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	4 Laporan	40.000.000	4 Dokumen	73.052.300,00	4 Dokumen	96.654.840	0	0						

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7 jenis Laporan	175.000.000	7 laporan	265.864.400,00	7 laporan	277.000.975	2	56.478.600							
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	160.000.000	4 Dokumen	154.807.200,00	4 Dokumen	197.392.350	0	0							
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	43.517.800,00	4 Dokumen	56.829.820	1	350.0000							
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 peraturan	75.000.000	1 Dokumen	198.923.100,00	1 dokumen	170.486.500		0							

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Peratura	75.000.000	1 Dokumen	101.082.300,00	0	0	0	0						
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD Akhir tahun (Unaudited dan Audited) yang disusun sesuai dengan standar	4 Kali	50.000.000	5 Dokumen	60.057.250,00	100 orang	160.730.675	57	113.740.000						
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	734.212.926.323	100%	632.801.181.154,00	100%	659.497.037.575	100%	177.583.351.520						
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 naskah	200.000.000	2 laporan	292.612.700,00	2 laporan	323.605.334	0	0						
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan keuangan	7 Laporan	650.555.452.000	7 laporan	579.463.517.162,00	7 laporan	573.973.552.573	2	157.481.733.520						
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Dana Darurat dan Mendesak	10 Dokumen	35.000.000	10 Dokumen	11.340.170.397,00	10 Dokumen	38.192.672.300	2	1.852.939.500						
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota	3 laporan	48.207.474.323	3 laporan	41.704.880.895,00	3 laporan	47.007.207.368	1	18.248.678.500						
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	80%	1.046.000.000	86%	3.675.008.797,00	86%	3.950.350.473	100%							

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	100%	1.046.000.000	100%	3.675.008.797,00	'100%	3.950.350.473	100%	1.041.421.131							
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan BMD yang di susun	60 laporan	45.000.000	100 Dokumen	129.550.600,00	112 Dokumen	107.249.938	28	53.490.000							
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 laporan	230.000.000	4 laporan	807.326.592,00	4 laporan	832.588.700	1	33.267.362							
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan BMD	500 laporan	380.000.000	235 laporan	2.167.725.466,00	500 laporan	2.496.525.604	125	862.802.729							
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 dokumen	56.000.000	226 Dokumen	344.839.100,00	226 Dokumen	317.629.931	57	33.652.500							
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan BMD	4 laporan	45.000.000	4 laporan	104.366.000,00	4 laporan	87.279.400	1	27.868.010							
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan BMD yang di susun	4 laporan	85.000.000	4 laporan	121.201.039,00	4 laporan	109.076.900	1	30.340.530							
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	4%	5.370.000.000	- 2.37%	8.826.613.974,00	3%	11.932.489.859	100%								
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. IKM/SKM Layanan Pajak Daerah 2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	5.370.000.000	1. 87,08 2. 5%	8.826.613.974,00	1. 80 2. 3%	11.932.489.859	100%	2.522.806.452							

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	118.798.575,00	2 Dokumen	139.999.980	1	35.807.518								
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah kebijakan pajak daerah	2 dokumen	55.000.000	2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan	552.343.673,00	2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan	550.707.018	11	69.644.288								
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	150.000.000	8 laporan	1.031.044.677,00	8 laporan	600.048.920	3	79.830.920								
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	550 dokumen	360.000.000	15 laporan	896.730.905,00	15 laporan	3.161.596.686	3	22.059.160								
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah	53 laporan	230.000.000	53 Laporan	347.213.300,00	53 laporan	368.220.720	14	41.164.000								
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang di sesuaikan NJOPnya	500 objek pajak	1.750.000.000	5000 objek Pajak	1.597.238.290,00	5000 objek Pajak	1.807.362.690	2000	1.431.148.500								

**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	801123 dokumen	525.000.000	801.123 Dokumen	533.446.925,00	801.123 Dokumen	810.093.480	200.300	210.148.400						
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 layanan	155.000.000	2 layanan	231.605.736,00	2 layanan	175.665.406	1	34.673.000						
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan Verifikasi	54 laporan	630.000.000	54 dokumen	606.866.830,00	54 laporan	935.165.551	13	217.324.792						
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan pajak Daerah	10.000 dokumen	925.000.000	8990 Dokumen	1.317.913.900,00	8990 Dokumen	1.845.071.578	2250	45.250.525						
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak Daerah		110.000.000	10 Dokumen	67.114.101,00	10 Dokumen	69.999.930	2	6.760.125						
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah	24 dokumen	310.000.000	53 Laporan	1.373.190.752,00	53 Laporan	1.299.357.400	10	273.397.226						
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	2 laporan	25.000.000	2 laporan	153.106.310,00	2 laporan	169.200.500	0	55.597.998						
				<b>JUMLAH</b>		<b>874.346.926.323</b>		<b>746.787.891.310</b>				<b>184.320.369.818</b>						

## BAB V

### P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan BPKPD yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BPKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) BPKPD ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indicator kinerja dan pagu indikatif BPKPD berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.

Selanjutnya setelah Dokumen RENJA BPKPD ditetapkan, menjadi pedoman BPKPD dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan Anggaran) BPKPD:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui kepala BAPPEDA (*Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).



- b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA BPKPD.



